

BAB I

PENDAHULUAN

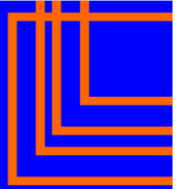
1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governancedan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Paradigma baru di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan oleh otonomi daerah menggeser peran pemerintah dari *power* kepada *empowerment*. Paradigma ini mengarahkan peran aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional.

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pewujudan *good government* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah dalam konteks (1) kinerja sesuai dengan Tupoksi, dan (2) keuangan sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disusun diawal tahun. Akuntabilitas pemerintahan yang dipercaya oleh publik dan stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



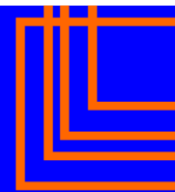
(AKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Gedebage selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Gedebage sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas



adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Gedebage Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan Gedebage

Kecamatan Gedebage merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Gedebage oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007 dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

• Utara	Kecamatan Cinambo Kota Bandung
• Selatan	Kabupaten Bandung
• Barat	Kecamatan Rancasari Kota Bandung
• Timur	Kecamatan Panyileukan Kota Bandung

Pembagian Wilayah Kecamatan Gedebage

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Cimincrang	8	31
2.	Cisaranten Kidul	15	84
3.	Rancabolang	10	57



4.	Rancanumpang	8	34
Jumlah		41	206

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Gedebage Tahun 2016

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

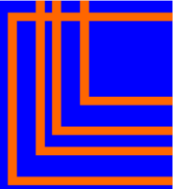
UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

Kecamatan Gedebage Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD), Kecamatan Gedebage mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Gedebage mempunyai fungsi :

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

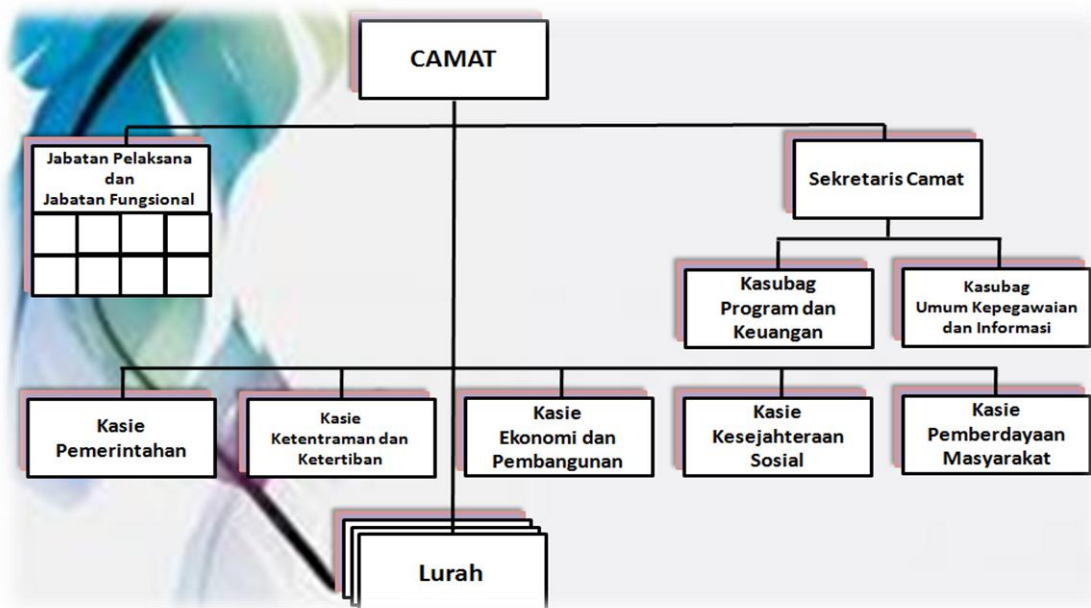
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Gedebage dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - a. Sub bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi
 - b. Sub bagian Program dan Keuangan
2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial



- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Lurah, membawahi
- a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

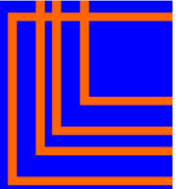
STRUKTUR KECAMATAN KOTA BANDUNG era TAHUN 2017



1.4 Landasan Hukum

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Gedebage Kota Bandung Triwulan III tahun 2018 ini disusun berdasarkan beberapa landasa hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih , Bebas , Korupsi , Kolusi dan Nepotisme

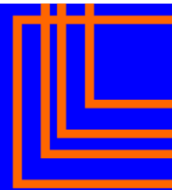


2. Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tetang Sistem Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reprulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Riviw Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan :
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018

1.5 Tehnik Pengunpulan Data Serta Tehnik Monitoring dan Evaluasi

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan Metode Penilaian Mandiri (*Self Asseement*)
2. Observasi Lapangan
3. Menggunakan Survey Kepuasan (*Questioner*) untuk IKM
4. Wawancara/ Tanya Jawan dan
5. Pencatatan/ Pendataan berkala



BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

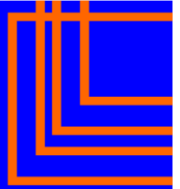
Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis Kecamatan Gedebage Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Gedebage Kota Bandung Nomor 050/56-Kec.PnylkTahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Gedebage Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Gedebage Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan



dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Gedebage Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014 - 2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Gedebage Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Gedebage Kota Bandung dan *stakeholder*.

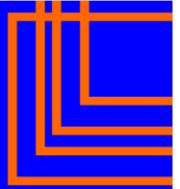
Selanjutnya, Renstra Kecamatan Gedebage Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Gedebage Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah

“memwujudkan pelayanan prima di kecamatan gedebage dalam rangka mewujudkan Bandung yang nyaman, unggul”



2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2014 - 2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

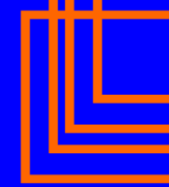
“meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Gedebage secara berkelanjutan”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran di upayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesenambungan sejalan dengan tujuan yang telah di tetapkan . Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam janka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan . Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepda pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.



Tabel 2.1.1

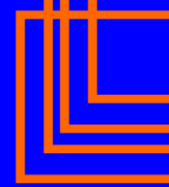
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja sebelum revisi dan setelah revisi
Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2018

	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	SEBELUM REVISI		SETELAH REVISI						
				INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
								1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Gedebage	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gedebage	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75	80	80,1	80,2	80,5
						Persentase Keluhan /pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100		
						Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	Nilai	825	850	890		
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Kategori	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	60	95	96		
						Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	60	95	96		
						Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	25	75	100		
						Persentase RW Juara	%	20	50	60		
						Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	60	70	75		

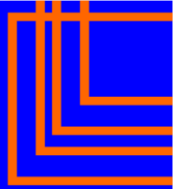


LAKIP KECAMATAN GEDEBAGE

Jl Gedebage Selatan No.292 Bandung



	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	SEBELUM REVISI		SETELAH REVISI						
				INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
								1	2	3	4	5
						Rasio Anggota Linmas	Rasio	1 : 0,7	1:1	1:1		
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	-	-	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%				75	80
2.	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Gedebage	Nilai AKIP Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	51	60	65		
				Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100		
				Tertib administrasi barang/asset daerah	%							



2.1.2. Indikator Kinerja Utama

- a. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gedebage ditetapkan melalui Keputusan Camat Gedebage Nomor : 050/03-Kec.Gdbg Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
- b. Bersamaan dengan revisi rencana strategis Kecamatan juga dilakukan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.
- c. Hanya ada dua indikator kinerja yang dimasukkan ke Indikaotr Kinerja Utama antara lain : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tingkat Pemberdayaan Lembaga karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD di Kecamatan.
- d. Uraian Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil sebelum dan setelah Revisi beserta penjelasannya dapat dilihat pada tabel 2.1.2.

Tabel 2.1.2

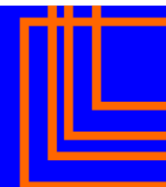
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Hasil REVISI Kecamatan Gedebage Kota Bandung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SEBELUM REVISI		SETELAH REVISI							
				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	TARGET PADA TAHUNAN				
									2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Gedebage	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gedebage	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan		80	80,1	80,2	80,5
						Persentase Keluhan/ pendaan pelayanan adminis tratif yang ditindaklanjuti	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan		100	100		
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Kategori	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan		95	96		
						Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan		95	96		
						Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	25	75	100		
						Persentase RW Juara	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan serta Rencana Aksi Walikota Bandung		50	60		
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan		70	75								



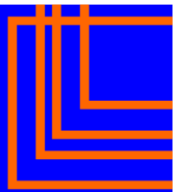
LAKIP KECAMATAN GEDEBAGE

Jl Gedebage Selatan No.292 Bandung



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SEBELUM REVISI		SETELAH REVISI							
				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	TARGET PADA TAHUNAN				
									2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	-	-	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan				75	80
	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Gedebage	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gedebage	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	Angka								
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Rasio Anggota Linmas	Rasio								
	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Gedebage	Nilai AKIP Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai								
				Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	%								

BUKAN IKU



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2014 - 2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Kecamatan Gedebage Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Revisi
Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2017

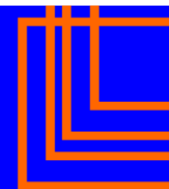
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gedebage	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,5
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75

Dalam mengantisipasi ketercapaian kinerja yang telah diperjanjikan perlu adanya progres atau perkembangan ketercapaian indikator per-triwulan sehingga perlu dibuat KPI (Key Performance Indikator) sebagai alat ukur yang mencerminkan progres pencapaian kinerja sehingga untuk mencapai tujuannya dapat dijadikan pegangan :

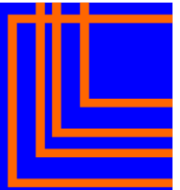
Key Performance Indikator (KPI) untuk kinerja tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Key Performance Indikator (KPI)
Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2018

Q1				Q2				Q3				Q4			
Indikator				Indikator				Indikator				Indikator			
8				12				16				20			
Rata-rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan TW 1				rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan TW 2				rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan TW 3				rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan TW 4			
Persiapan pengadaan Barang dan Jasa Program PIPPK				Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup RW yang direalisasi				Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup RW yang direalisasi				Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup RW yang direalisasi			



Q1				Q2				Q3				Q4			
Persiapan pengadaan Barang dan Jasa Program PIPPK				Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup LKK yang direalisasi				Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup LKK yang direalisasi				Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup LKK yang direalisasi			



BAB III

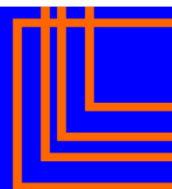
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Kecamatan Gedebage Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014 - 2018 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun



2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100%	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100%	Sesuai Target
3.	< 100%	Tidak Mencapai Target

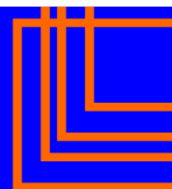
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Gedebage Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014 - 2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Gedebage Nomor : 050/20.2-Kec.gdbg Tahun 2018, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- ✚ Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- ✚ Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Gedebage Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Gedebage Nomor : 050/20.2-Kec.gdbg Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Gedebage Kota Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Gedebage Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:



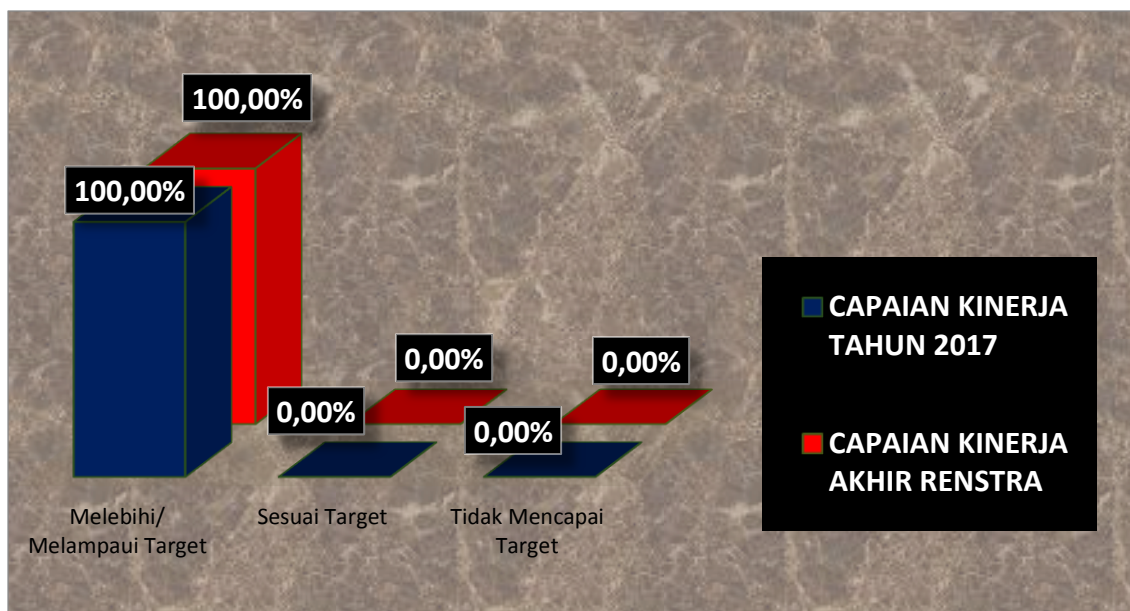
Tabel 3.2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2018

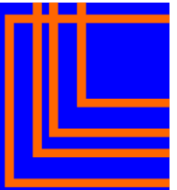
NO	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAIAN %	RENSTRA (2018)	
						TARGET	CAPAIA N %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai			105,53	80,5	101,43
2.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%			132,91	80	106,2
Jumlah rata rata					238.44		103,81

Grafik 3.2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gedebage
Kota Bandung Tahun 2017



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :



Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target sebanyak 2 (dua) indikator atau sebesar 100,00 % ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 105,53 dan Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian kinerja 132,91 %.

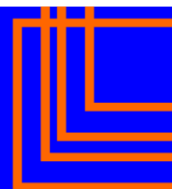
Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100 % sebanyak 0 (nol) indikator atau sebesar 0,00% sehingga capaian yang mencapai 100% tidak ada.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target atau kurang dari 100 % sebanyak 0 (nol) indicator atau sebesar 0,00% sehingga capaian yang kurang dari 100% tidak ada.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Gedebage Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai *visi dan misi Kota Bandung Tahun 2014-2018* sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Gedebage Kota Bandung adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI (2016)	RENSTRA (2018)	
							TARGET	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,0	84,95	105,53	79,1	80,5	89,79
2.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%	70	99,68	132,91	-	75	131,33

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut :

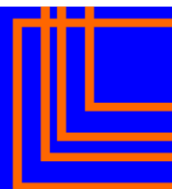
Tabel 3.3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
	Melebihi/ melampaui target	2 (dua) Indikator sasaran/ 100,00%
	Sesuai target	0 (nol) Indikator sasaran/ 00,00%
	Tidak mencapai target	0 (nol) Indikator sasaran/ 00,00%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 2 Indikator Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :



Tabel 3.3.3

Pencapaian Target Sasaran
Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET(>100%)		SESUAI TARGET(=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)	
			JML	%	JML	%	JML	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gedebage	1	1	100	0	0	0	0
2.	Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100	0	0	0	0

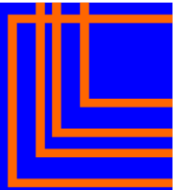
Dari 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Gedebage Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.4

Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2018

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran1		
1.	Melebihi/ melampaui target	1	100,00%
2.	Sesuai target	0	0 %
3.	Tidak mencapai target	0	0 %
B.	Sasaran2		
1.	Melebihi/ melampaui target	1	100,00%
2.	Sesuai target	0	0 %
3.	Tidak mencapai target	0	0 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

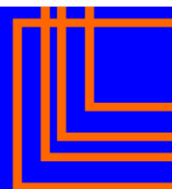


dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Revisi Kecamatan Gedebage Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gedebage,

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.5

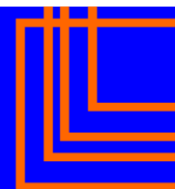
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gedebage

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016	Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks			102,69	79,10	80,5	101,43

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat.

✚ Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 82,67 dari target sebesar 80,5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 102,69 % atau melampaui target yang diperjanjikan. Sedangkan Target pada tahun 2018 mencapai capaian yang cukup baik target tercapai 81,50 dengan realiaso 101, 43 melampaui target yang diperjanjikan.



Tabel 3.3.1

Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan)

Kecamatan Gedebage Tahun 2018

NO	UNSUR PELAYANAN	REKAP TAHUN 2018	
		NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Prosedur Pelayanan	3,86	0,24
2	Persyaratan pelayanan	3,70	0,23
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3,71	0,23
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,68	0,23
5	Tanggung Jawa Petugas Pelayanan	3,68	0,23
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,65	0,23
7	Kecepatan Pelayanan	3,73	0,22
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3,74	0,23
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan	3,77	0,23
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	3,61	0,28
11	Kepastian Biaya Pelayanan	3,68	0,28
12	Kepastian Jadwal pelayanan	3,76	0,22
13	Kenyamanan Lingkungan	3,65	0,23
14	Keamanan Pelayanan	3,79	0,23
		51,65	3,31
IKM Unit Pelayanan			82,67
Mutu Pelayanan			B
Kinerja Unit Pelayanan			Baik

Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Gedebage dan kelurahan

Nilai Unsur Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Gedebage terhadap 150 responden dengan perhitungan sebagai berikut:

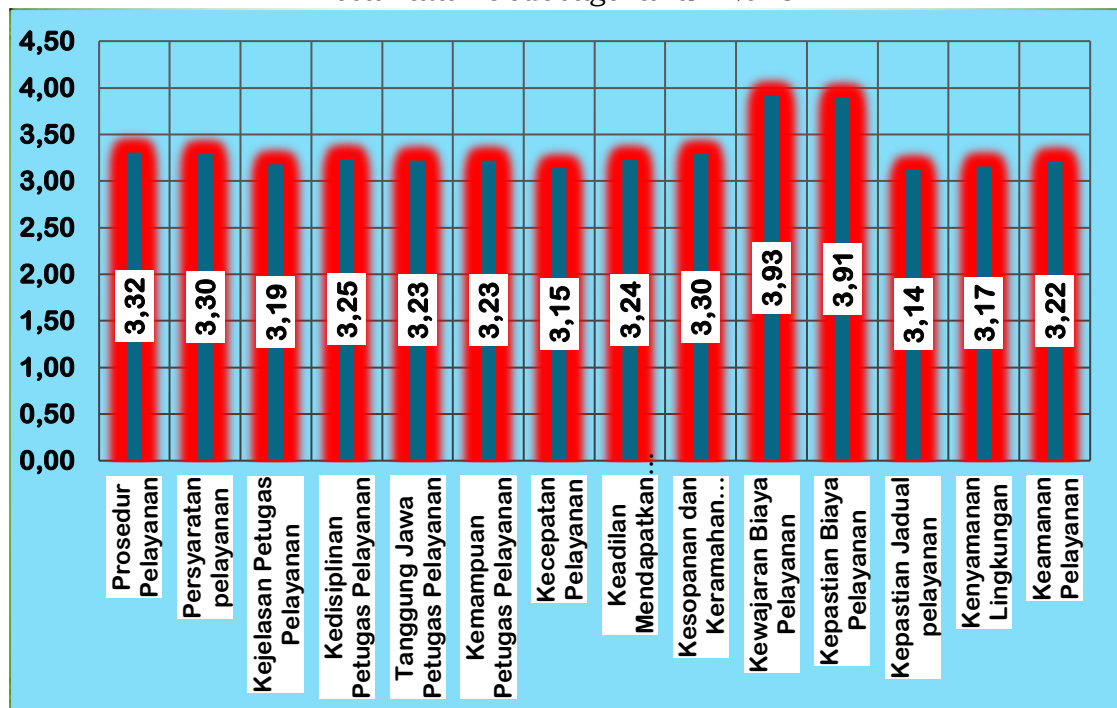
Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0,071)

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25), maka diperoleh hasil :

Nilai IKM setelah dikonversi = 82,67

Grafik. 3.3.6

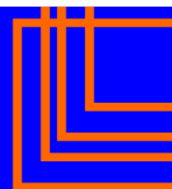
Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan)
Kecamatan Gedebage Tahun 2018



Dari tabel Unsur Pelayanan dan grafik diatas dapat kita lihat data yang capaiannya yang tinggi hingga capaiannya yang rendah hal ini mencerminkan mutu pelayanan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Gedebage.

Data tertinggi pada tabel dan grafik diatas terletak pada unsur kewajaran biaya pelayanan yang mendapat nilai 3,93 dan unsur kepastian biaya pelayanan yang mendapat nilai 3,91, hal ini Kecamatan melakukan pelayanan secara gratis sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditentukan.

Data terendah pada tabel dan grafik diatas terletak pada unsur Kecepatan Pelayanan yang mendapat nilai 3,15 dan unsur Kepastian Jadwal



Pelayanan yang mendapat nilai 3,14. Untuk Kecepatan Pelayanan dan Jadwal Pelayanan terkait dengan pelayanan Kependudukan KTP yang sebagian besar masih belum dapat dipastikan terkait dengan jumlah stock keping KTP yang ada untuk di kecamatan karena terbatasnya pengedropan keping KTP dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 Kecamatan Gedebage telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sebesar 79,14 dari target 81,05 atau capaian sebesar 95,69 berarti kinerja nyata pada tahun 2017 mengalami kenaikan Indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,53. Capaian tahun 2016 sebesar 80.00

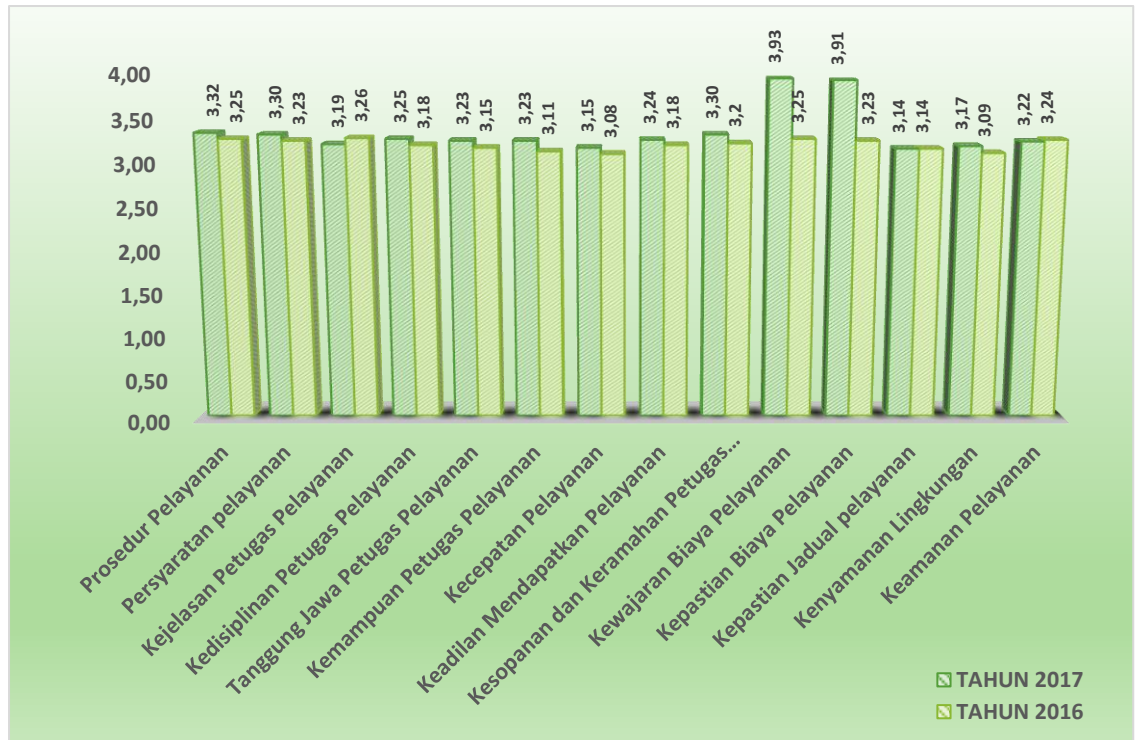
Tabel 3.3.6
Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan)
Kecamatan Gedebage Tahun 2018 dan Tahun 2017

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN TAHUN 2018	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN TAHUN 2017	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Prosedur Pelayanan	3.90	3,86	0.04
2	Persyaratan pelayanan	3.70	3,23	0.07
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3.90	3,71	0.19
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3.68	3,18	0.07
5	Tanggung Jawa Petugas Pelayanan	3.70	3,15	0.08
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3.65	3,11	0.12
7	Kecepatan Pelayanan	3.73	3,08	0.07
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3.74	3,18	0.06
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan	3.77	3,20	0.10
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	3.61	3,25	0.68
11	Kepastian Biaya Pelayanan	3.68	3,23	0.68
12	Kepastian Jadwal pelayanan	3.76	3,14	0.00
13	Kenyamanan Lingkungan	3.65	3,09	0.08
14	Kenyaman Pelayanan	3.79	3,24	0,55
		82.21	45,4	
	IKM Unit Pelayanan	82.21	79,14	
	Mutu Pelayanan	B	B	
	Kinerja Unit Pelayanan	Baik	Baik	

Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Gedebage dan kelurahan

Grafik 3.3.1

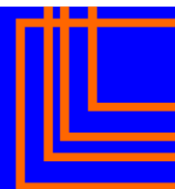
Grafik perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan Kecamatan Gedebage tahun 2018 dan 2017



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat capaian kinerja indikator **Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat** sebagai berikut :

Pada tahun 2017 dilihat dari nilai unsur kejelasan petugas pelayanan nilai 26 dan pada tahun 2017 nilai unsur petugas pelayanan sebesar 3,19 sehingga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,05 hal terkait dengan tanda pengenal yang belum digunakan dengan petugas pelayanan dan sasset ini sudah ada tanda pengenal dan seragam pada pelayana pada petugas pelayanan yang ada di loket pelayanan.

Bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan dari target nilai akhir renstra 81,5 dan capaian 82,67 maka capaian kinerjanya mencapai 101,43 %, sehingga perlu adanya reuiu untuk target indeks kepuasan masyarakat baik pada Rencana Strategi (Renstra) maupun Rencana Kerja



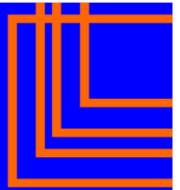
Tahunan (RKT) serta IKU Kecamatan Gedebage sebagai perencanaan untuk tahun 2018.

Bila capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2017 dibandingkan dengan OPD lain (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama maka :

Tabel 3.3.7

Data Perbandingan Indeks Pelayanan /
Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Instansi lain (Kecamatan lain)
Tahun 2018

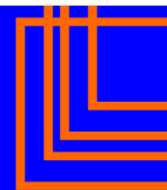
NO	NAMA SKPD / UNIT KERJA	IKM	Rank
1	KECAMATAN ANDIR	81,38	23
2	KECAMATAN ANTAPANI	82,93	13
3	KECAMATAN ARCAMANIK	83,33	9
4	KECAMATAN ASTANAANYAR	81,55	22
5	KECAMATAN BABAKAN CIPARAY	82,48	16
6	KECAMATAN BANDUNG KIDUL	82,43	18
7	KECAMATAN BANDUNG KULON	82,83	14
8	KECAMATAN BANDUNG WETAN	82,45	17
9	KECAMATAN BATUNUNGGAL	80,15	29
10	KECAMATAN BOJONGLOA KALER	80,18	28
11	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL	81,00	26
12	KECAMATAN BUAHBATU	86,93	1
13	KECAMATAN CIBENYING KALER	84,14	5
14	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL	86,34	2
15	KECAMATAN CIBIRU	82,35	19
16	KECAMATAN CICENDO	83,17	11
17	KECAMATAN CIDADAP	81,20	24
18	KECAMATAN CINAMBO	85,98	3
19	KECAMATAN COBLONG	84,05	6
20	KECAMATAN GEDEBAGE	80,50	27
21	KECAMATAN KIARACONDONG	83,11	12



22	KECAMATAN LENGKONG	81,60	21
23	KECAMATAN MANDALATI	82,00	20
24	KECAMATAN GEDEBAGE	82,67	15
25	KECAMATAN GEDEBAGE	83,48	8
26	KECAMATAN REGOL	81,17	25
27	KECAMATAN SUKAJADI	85,33	4
28	KECAMATAN SUKASARI	79,45	30
29	KECAMATAN SUMUR BANDUNG	83,71	7
30	KECAMATAN UJUNG BERUNG	83,31	10
RATA - RATA		82,70	

Bagian ORPAD

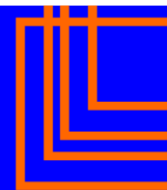
Bila dibandingkan dengan Indeks Pelayanan 30 (tiga puluh) Kecamatan lainnya IKM Kecamatan Gedebage berada dibawah rata-rata capaian IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan, capaian IKM Kecamatan Gedebage (79,1) diatas rata-rata IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan urutan ke 28 dengan rata-rata Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan di Kota Bandung 81,66.



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gedebage didukung oleh Program :

No	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa tenaga kerja pendukung adm perkantoran , tersedia jasa keamanan kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaraan dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan rumah dinas
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur(program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut, Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga
4	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain Simpul Space Kecamatan, 30 kampung Kreatif Wisata, <i>Creative District Project</i> , (termasuk pembinaan KUKM, Profil Potensi Ekonomi), Rumah Sehat, Satu Taman Satu Komunitas, Satu Kampung Satu Taman, Forum Jaga Budaya di Kelurahan, Forum RW Juara, Forum Karang Taruna Juara, Forum LPM Juara, Kampung Berkebun, Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Profil masalah Sosial), Rumah Sehat, Kampung Berkebun, Bike Sharing, Jum'at Bersepeda, Gerakan <i>Zero Waste Home</i> , Bank Sampah, Motor Sampah Kelurahan, Supermarket Sampah, Tempat Sampah RW/ Jalan Utama, Sejuta Biopori/ Sumur Resapan, Mesin Pencacah Sampah, Pengajuan Mobil Pembersih, Bendungan Sampah, <i>Septic Tank Communal</i> , Hemat Air dan Daur Ulang, <i>River</i>

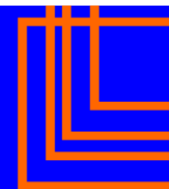


	<p><i>Green Wall, Gerakan Atap Hijau, Gerakan Pagar Hijau, Gerakan Satu Rumah Satu Pohon, Gerakan Bandung Green N Clean, Gerakan Bandung Bersih, Jalan Caang Baranang, Media Kampanye Bandung Bebas, Banjir, Perkerasan paving Kotak, Gerakan Membangun Tanpa Menggusur di Kampung Kumuh, Kebinamargaan, Pasukan Gorong Gorong (termasuk MUSRENBANG), Penanganan Pasar Tumpah, Satpol PP Kecamatan, Forum PKL, Media Brosur Tertib PKL (termasuk operasional SATPOL PP Kecamatan, Pembinaan LINMAS, SATWANKAR) SATGASUS PKL, Balai RW/ Markas Karang Taruna, Safari Aspirasi Walikota Dengan Warga Level RW Setiap RW Setiap Minggu, Honor RW RT (termasuk pembinaan RW RT), (termasuk operasional Pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)</i></p>
--	---

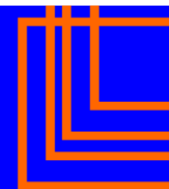
Tabel 3.3.13

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gedebage

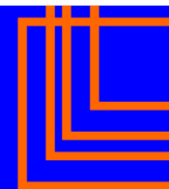
No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	(baik/kurang)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	224.996.391	178.406.609	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Baik
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19.006.400	12.246.300	Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas / operasional	Baik
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	189.422.700	174.530.000	Tersedianya Jasa kebersihan Kantor	Baik
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	42.400.000	16.230.000	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	Baik



No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	(baik/kurang)
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	210.871.408	166.158.112	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	Baik
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.893.412	63.587.650	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Baik
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.775.498	33.397.150	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Baik
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.829.990	30.631.000	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Baik
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.400.450	22.939.020	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Baik
		Penyediaan Makanan dan Minuman	78.184.000	61.200.000	Tersedianya Makanan dan minuman	Baik
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125.250.000	74.046.290	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Baik
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	459.732.500	426.011.500	Tersedianya jasa pendukung operator BIRMS dan Command center	Baik
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	60.000.000	60.000.000	Tersedianya tenaga keamanan kantor	Baik
2.	Program	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung	91.646.859	54.352.806	Tersedianya Gedung Kantor	Baik



No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	(baik/kurang)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	kantor			yang memadai	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas		6.741.300	Tersedianya Rumah Dinas yang memadai	Baik
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	507.259.500	489.720.700	Tersedianya Kendaraan dinas operasional yang memadai	Baik
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	56.925.000	56.067.000		
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	84.132.500	84.018.000	Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga	Baik
4.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	65.550.100	52.790.400	Terbinanya (UKM, Koperasi/Pra Koperasi), Tersedianya Produk Unggulan Kecamatan, Tersedianya data perekonomian masyarakat yang akurat, Meningkatnya wawasan warga akan peluang usaha, Tersedianya data laporan pelaksanaan Bawaku Makmur	Baik
5.		Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	784.685.200	502.361.360	Terbinanya lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan (institusi keagamaan, kegiatan generasi muda, partisipasi dan	Baik

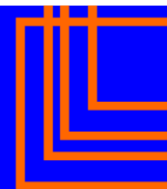


No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	(baik/kurang)
					pemberdayaan perempuan, ketahanan keluarga, memfasilitasi ketahanan pangan dan penanggulangan bencana	
6.		Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.931.137.206	1.528.180.000	Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, fasilitas umum dan fasilitas social, pelestarian lingkungan hidup, dan pelaksanaan program keindahan dan kebersihan	Baik
7.		Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	839.696.000	778.530.000	Pembinaan perlindungan masyarakat, fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Baik
8.		Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	1.679.519.675	1.489.135.960	Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan dan memfasilitasi pemilihan pengurus RT/RW, pembinaan ketentraman dan ketertiban.	Baik
9.		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	57.684.000	35.493.250	Memfasilitasi dan melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan	Baik
10.		Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	295.218.000	173.713.500	Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat	Baik



LAKIP KECAMATAN GEDEBAGE

II Gedebage Selatan No.292 Bandung



No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	(baik/ kurang)
JUMLAH			11.867.487.856	10.736.277.801		

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Gedebage

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

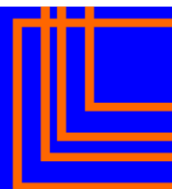
1. Tersedianya tenaga pelayanan non PNS yang dapat mendukung peningkatan pelayanan,

Faktor Penghambat :

1. Kejelasan petugas pelayanan

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :

1. Dalam menangani permasalahan di tahun 2017 tentang kejelasan petugas pelayanan maka di tahun 2018 sudah menggunakan tanda pengenal dan status dari pada lulusan akhir / pendidikan yang akan menentukan mampu kah untuk bisa berkualitas sebagai petugas pelayanan .Rata2 Petugas Pelayanan baik Kecamatan dan kelurahan menghadapi perubahan Global mereka para sarjana di berbagai bidang ke ilmunan sehingga mampu untuk menjelaskan pada masyarakat Kecamatan Gedebage
2. Indikator pelayanan pada tahun 2019 meningkat



Sasaran 2

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.14

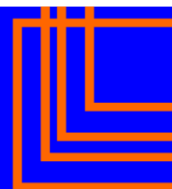
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016	Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%		99,68	120,36	D	81,5	112,83
Rata-rata Capaian Indikator					120,36			112,83

Sasaran meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

✚ Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Capaian kinerja nyata Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebesar 99,68 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 120,36 % atau melampaui target yang diperjanjikan.



Tabel 3.3.1

Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Kecamatan Gedebage Tahun 2018

NO	KELURAHAN	NILAI UNSUR TINGKAT PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (%)			
		RW JUARA	SISKAMLING AKTIF	LKK AKTIF	RATA - RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cimincrang	50	100	65	100
2	Cisarantel Kidul	60	100	65	88,89
3	Rancabolang	57,14	92,86	65	83,33
4	Rancanumpang	66,67	100	65	88,89
RATA RATA PER UNSUR		64,29	98,00	91,67	90,27
Kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					

Sumber data : Kelurahan se- Kecamatan Gedebage

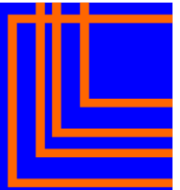
Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diperoleh dari pengukuran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 4 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan.

Nilai tingkat lembaga kemasyarakatan = (% RW JUARA + % SISKAMLING AKTIF + % LKK AKTIF) dibagi 3

% RW JUARA = RW yang memenuhi kriteria (1 dari 5 pengelolaan sampah dan 5 dari 21 roadmap wali Kota) dibagi Jumlah RW di kelurahan tersebut

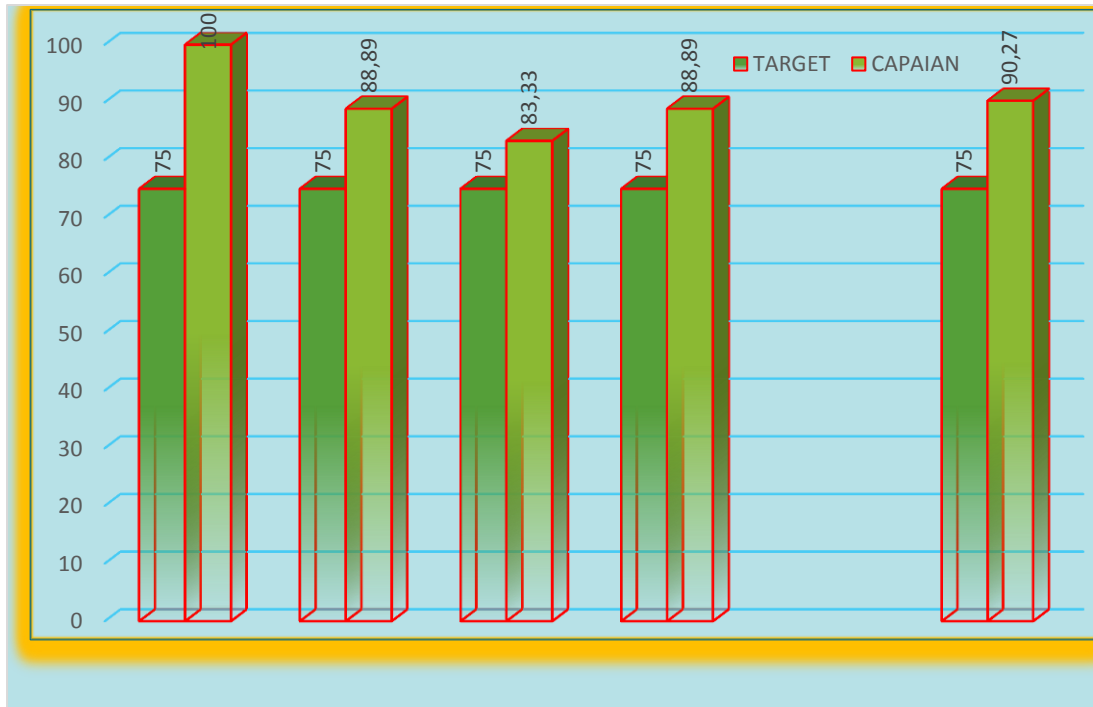
% SISKAMLING AKTIF = Jumlah RW yang memenuhi 5 kriteria siskamling aktif dibagi Jumlah RW di Kelurahan tersebut

% LKK AKTIF = Jumlah LKK (PKK, Karang Taruna dan LPM) yang memenuhi 4 kriteria LKK Aktif dibagi 3



Grafik. 3.3.6

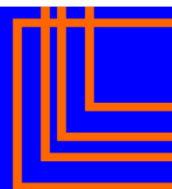
Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan)
Kecamatan Gedebage Tahun 2017



Dari tabel Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan grafik diatas dapat kita lihat data yang capaiannya yang tertinggi hingga capaiannya yang terendah hal ini mencerminkan bervariasi kinerja yang telah dilaksanakan kelurahan di Kecamatan gedebage.

Data tertinggi pada tabel dan grafik diatas pada Kelurahan Cisaranten Kidul dimana 3 unsur penilaian memiliki nilai yang sama dengan nilai maksimal dalam hal ini Kelurahan perlu mempertahankan capaian capaian yang telah diraih.

Data terendah pada tabel dan grafik diatas pada Kelurahan Cisaranten kidul Kidul dimana dari 3 unsur penilaian yang menduduki nilai terendah pada RW Juara sehingga perlu adanya peningkatan capaian pada RW Juara di kelurahan Cimincrang yang adatanya mencapai 50 sehingga perlu adanya peningkatan capaiannya.



Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 atau tahun sebelumnya capaian Kecamatan Gedebage sebesar 90,27 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena Kecamatan Gedebage belum melakukan pengukuran Tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

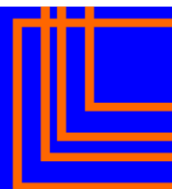
Tabel 3.3.6
Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan)
Kecamatan Gedebage Tahun 2018 dan Tahun 2017

NO	Kelurahan / Kecamatan	Capaian Tingkat Pemberdayaan Masyarakat TAHUN 2017	Capaian Tingkat Pemberdayaan Masyarakat TAHUN 2016	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Kelurahan Cimincrang	100	N/D	N/D
2	Kelurahan Cisaranten Kidul	88,89	N/D	N/D
3	Kelurahan Rancabolang	83,33	N/D	N/D
4	Kelurahan Rancanumpang	88,89	N/D	N/D
5	Capaian se-Kecamatan	90,27	N/D	N/D

Sumber data : Kelurahan di Kecamatan Gedebage

Bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan dari target nilai akhir renstra 80 dan capaian 90,27 maka capaian kinerjanya mencapai 120,36 %, sehingga perlu adanya review untuk target indeks kepuasan masyarakat baik pada Rencana Strategi (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta IKU Kecamatan Gedebage sebagai perencanaan untuk tahun 2018.

Bila capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 dibandingkan dengan OPD lain (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama maka :



Tabel 3.3.7

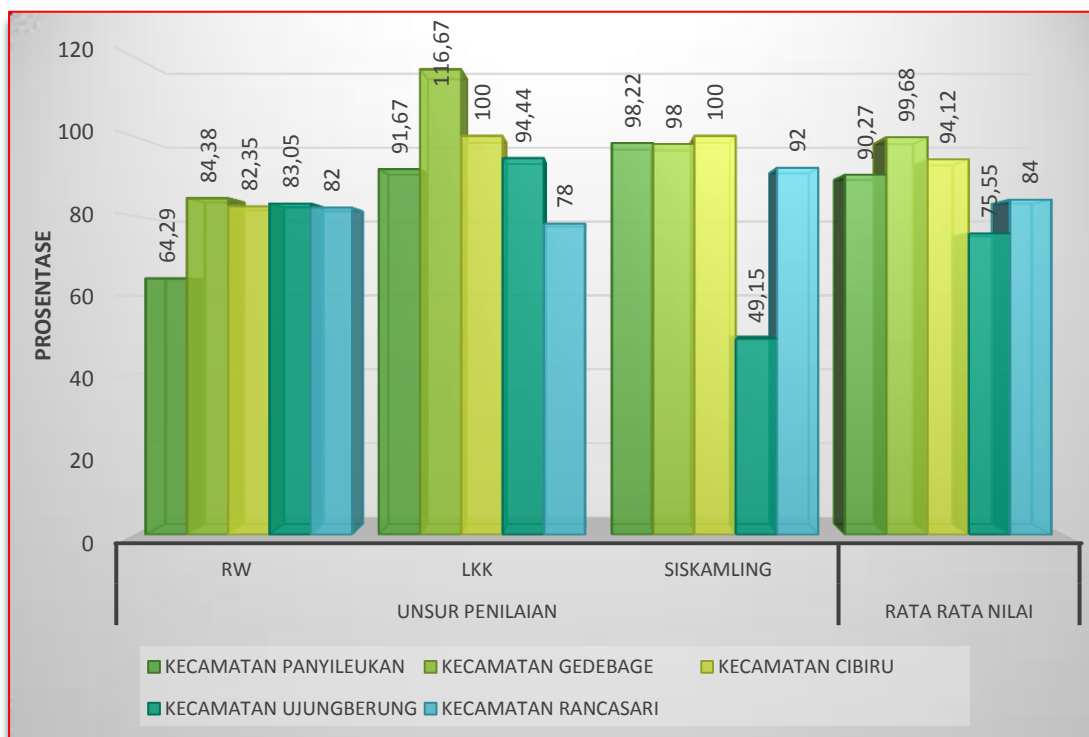
Data Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
Tahun 2017

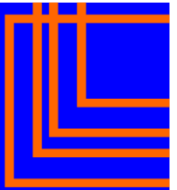
NO	NAMA SKPD / UNIT KERJA	UNSUR PENILAIAN JUARA			
		RW	LKK	Siskamling	NILAI
1	KECAMATAN PANYILEUKAN	64,29	91,67	98,22	90,27
2	KECAMATAN GEDEBAGE	84,38	116,67	98	99,68
3	KECAMATAN CIBIRU	82,35	100	100	94,12
4	KECAMATAN UJUNGBERUNG	83,05	94,44	49,15	75,55
5	KECAMATAN RANCASARI	82,00	78,00	98,00	84,00

Bagian ORPAD

Grafik 3.3.2

Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Tahun 2018

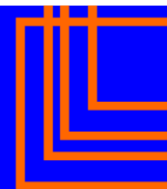




Bila melihat tabel dan grafik untuk tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dibandingkan dengan kecamatan lain yang memiliki jumlah kelurahan sama dan merupakan daerah pemekaran yang memiliki kateristik yang sama, maka capaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gedebage menduduki posisi peringkat ditengah dan untuk unsur penilaian LKK aktif dan siskamling aktif menduduki posisi ditengah dari kecamatan yang menjadi bahan pembanding. Sedangkan untuk unsur penilaian RW Juara Kecamatan Gedebage menduduki ranking paling bawah sehingga perlu adanya peningkatan pencapaian untuk RW Juara pada tahun 2018.

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gedebage didukung oleh Program :



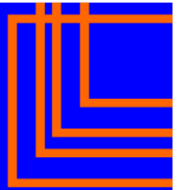
No	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Output Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Tabel 3.3.13

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gedebage

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/ku rang)
1.	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi RW	2,802,851,257	2,618,038,114	Jumlah sub kegiatan inovasi	Baik
		Fasilitasi PKK	312,837,000	291,766,250	Jumlah sub kegiatan inovasi	Baik
		Fasilitasi Karang Taruna	308,700,050	363,092,890	Jumlah sub kegiatan inovasi	Baik
		Fasilitasi LPM	362,626,900	355,146,500	Jumlah sub kegiatan inovasi	Baik
JUMLAH			3,877,015,207	3,628,043,754	Prosen : 93,57	

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Gedebage



Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gedebage disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung

1. Partisipasi dari masyarakat;
2. Peran serta dari aparatur kelurahan dalam mendampingi kegiatan;

Faktor Penghambat

1. Masih adanya pengusulan kegiatan yang kurang tepat sehingga mengalami hambatan dalam pelaksanaan;

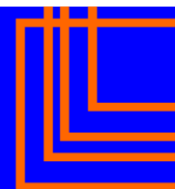
Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gedebage, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perlunya pendampingan dalam pengusulan kegiatan dari aparatur di kelurahan;

Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Gedebage Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Gedebage Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 23.209.422.100,22** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 21.465.971.236** atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,48 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 cukup baik kondisi anggaran adalah Silpa **Rp. 1.743.450.864,22** hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Gedebage Kota Bandung pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.52

Rencana dan Realisasi Anggaran Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2018

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	7.990.472.649	7.108.234.047	88,95 %
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	3.877.015.207	3.628.043.754	93,57 %
	Jumlah	11.867.487.856	10.736.277.801,-	90,46 %

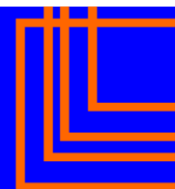
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Gedebage Kota Bandung pada tahun 2017.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Gedebage Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.53

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Gedebage Tahun 2017

No	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1,	1			
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100 %	7.108.234.047	88,95 %



2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
B. Sasaran 2,	1				
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100 %	3.628.043.754	93,57 %
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		

Anggaran yang telah dikeluarkan efektif untuk pencapaian sasaran

Tabel 3.54

Tingkat Efisiensi Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tahun 2017

No	Sasaran	% Kinerja	% Capaian Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3-4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	102,69	89,22	13,47
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	120,36	94,08	26,28
Rata - Rata		111,52	91,08	20,44

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Gedebage Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian sasaran kinerja.

Pencapaian Misi pada Tahun 2017 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2013-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.55

Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Kecamatan Gedebage Kota Bandung
2015 - 2018

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-4	Selisih	% (dari Pagu Indikatif)
A.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima		10.736.277.801	1.138.156.756,5	91,08

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Gedebage Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

1.4 Informasi Tambahan

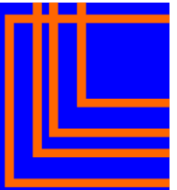
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Gedebage Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Gedebage Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Nasional

No	Prestasi	Juara	Tahun
1	Merupakan salah satu kecamatan unggulan sebagai Kecamatan Sehat	Juara I	2015

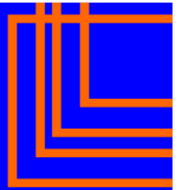
2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

No	Prestasi	Juara	Tahun
1	Lomba Kesrak pelaksanaan		2015



3. Prestasi Tingkat Kota Bandung

No	Prestasi	Juara	Tahun
1			2015
2			2015
3			2015
4			2015
5			2015
6			2015
7			2015
8			2015
9			2015



BAB IV

PENUTUP

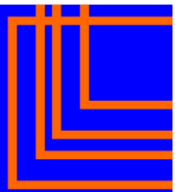
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2018, Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No, 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak,

LKIP Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Gedebage Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan,

Dalam tahun 2018 Kecamatan Gedebage Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai, Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 82,67 dari target 80,5 atau interpretasi memuaskan
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan prosentase 90,27% dari target 75% atau interpretasi memuaskan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 - 100 yang termasuk dalam Interpretasi **Memuaskan**. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota



Bandung Tahun Anggaran 2018 total Anggaran Kecamatan Gedebage pada Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp. 23.209.422.100,22,-** sedangkan realisasi anggaran Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) mencapai **Rp. 21.465.971.236,-** atau dengan serapan dana APBD Anggaran Belanja Langsung (BL) mencapai 92,48 %,

Renstra Kecamatan Gedebage Kota Bandung 2014-2018 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran renstra sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 102,69%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 120,36%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gedebage Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Gedebage Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

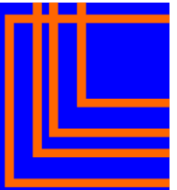
Bandung, 18 Februari 2018

Camat Gedebage

Drs, H. BAMBANG SUKARDI, M.Si

Pembina Tk,I

NIP, 19671005 198903 1 008



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan alhamdulillah kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmatnya dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2017 Kecamatan Gedebage

Program Rencana Kerja (RKT) merupakan penjabaran dari rencana Strategi 2014-2018 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permanpan dan RB) RI Nomor 29 Tahun 2010 bahwa setiap Instansi diharuskan untuk memiliki acuan dalam pencapaian target kinerja berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan sebagai konsistensinya terhadap salah satu pihak terwujudnya tata Pemerintahan yang baik (Good Governmen).

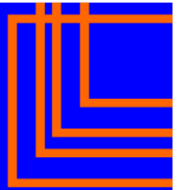
Dan dalam penyusunan dokumen ini sebagai bentuk Pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Kecamatan Gedebage Kota Bandung , semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Penyelenggaraan di Kota Bandung khususnya Kecamatan Gedebage.

CAMAT GEDEBAGE,

Drs. BAMBANG SUKARDI , M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19671005 198903 1 008



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ridho Nya Revisi Rencana Strategis Kecamatan Gedebage Tahun 2013-2018 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Dengan ditetapkan peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung menurut untuk dilaksanakannya revisi atas Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah atas dasar hal tersebut serta dalam upaya untuk meningkatkan akurabilitas kinerja Kecamatan Gedebage melaksanakan revisi pada perencanaan strategis yakni Misi, Tujuan dan Sasaran, hal ini berimplikasi pada perubahan Indikator Kinerja/ Indikator Kinerja Utama, target indicator dan perjanjian kinerja kecamatan. Revisi dilaksanakan dengan tetap memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

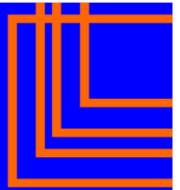
Revisi Rencana Strategis Kecamatan Gedebage tahun 2013-2018 ini akan menjadi landasan atas penyusunan dokumen perencanaan mulai 2017 dan semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi unsur penyelenggaraan program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

CAMAT GEDEBAGE,

Drs. BAMBANG SUKARDI , M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19671005 198903 1 008



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan alhamdulillah kami panjatkan atas kehadiratNya Allah SWT atas berkat rahmatnya dan karuniaNya kami berusaha untuk menyelesaikan Laporan Akutabilitas Kinerja Instantansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Gedebage sebagai perwujudan akutabilitas yang mana mencerminkan realisasi dan capaian indicator kinerja utama (IKU).

Untuk itu Kecamatan Gedebage melakan pembenahan kinerja dan kinerja utama untuk mampu meningkatkan peranan serta Kecamatan sebagai sub sistem dari system Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat di Lingkungan Kecamatan Gedebage.

Demikian Laporan Akutabilitas Kinerja Kecamatan Gedebage masih sangat kurang memuaskan dari apa yang diinginkan sebagai bahan laporan dan semoga bermanfaat dan dapat dijadikan bahan evaluasi.

CAMAT GEDEBAGE,

Drs. BAMBANG SUKARDI , M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19671005 198903 1 008